



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM MAKASSAR TIDAK RANTASA DI KOTA MAKASSAR

Oleh:

Ince Aprianti¹ dan Mailinda Eka Yuniza²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan Program Makassar Tidak *Rantasa* (MTR) dalam mengatasi masalah kebersihan di kota Makassar. Dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Program Makassar Tidak *Rantasa* (MTR) dan menganalisis upaya Pemerintah dalam meningkatkan Program Makassar Tidak Rantasa (MTR) di Kota Makassar.

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian empiris normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer melalui penelitian lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Makassar Tidak Rantasa (MTR) ini masih kurang memenuhi teori kebijakan publik. Kegiatan Makassar Bebas Sampah (*mabasa*) pada Program Makassar Tidak Rantasa (MTR) telah berjalan dengan baik di Kecamatan Tamalanrea, dan Manggala namun pada Kecamatan Wajo terkendala di prasarana berupa alat kebersihan. Terkait kegiatan Bank sampah pada Program Makassar Tidak Rantasa (MTR) tidak terlaksana dengan baik di semua kecamatan yang diteliti baik di Kecamatan Wajo, Kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan Manggala disebabkan kurangnya sosialisasi dan anggaran Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar Kegiatan penghijauan lorong garden berjalan dengan baik di Kecamatan Wajo dan Kecamatan Manggala sedangkan Kecamatan Tamalanrea kurang berjalan dengan baik sebab minimnya dukungan dari pemerintah berupa sarana dan prasarana yang mendukung kegiatannya.

Kata Kunci: Kebijakan Kebersihan, Makassar Tidak *Rantasa*

MAKASSAR PROGRAM POLICY IMPLEMENTATION IS NOT DIRTY IN THE CITY OF MAKASSAR

¹ Mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

² Dosen Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada



By: Ince Aprianti³ and Mailinda Eka Yuniza⁴

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the implementation of the Makassar No Rantasa Program (MTR) policy in overcoming hygiene problems in the city of Makassar. And analyze the factors that become obstacles in the implementation of the Makassar No Rantasa Program (MTR) and analyze the Government's efforts in improving the Makassar No Rantasa (MTR) Program in Makassar City.

The type of research used in compiling this study is normative empirical research. This research is described. The type of data used is primary data and secondary data. Primary data collection techniques through field research, while secondary data obtained through library research. Primary and secondary data are analyzed qualitatively.

The results of the study show that the Makassar No Rantasa (MTR) Program still lacks a public policy theory. Makassar's Waste-Free (mabasa) activities in the Makassar No Rantasa Program (MTR) has been running in both the Tamalanrea and Mongolia Subdistricts, but in Wajo District the infrastructure is in the form of cleaning equipment. Related to the west bank activities in the Makassar No Rantasa Program (MTR) were not carried out well in all surveyed districts both in Wajo Subdistrict, Tamalanrea Subdistrict, and Manggala Subdistrict due to lack of socialization and budget of Makassar City Parks and Sanitation Service both in Wajo and Manggala. Subdistricts, while Tamalanrea Subdistrict is not running well because of the lack of support from the government in the form of facilities and infrastructure that support its activities.

Keywords: Solid Waste Policy, Makassar is nor dirty

³ Law Master Students, Law Faculty, Gadjah Mada University,

⁴ Law Lecturer State Administration, Law Faculty, Gadjah Mada University